

KERUGIAN NEGARA RP1,83 TRILIUN MAKI Pertanyakan Korupsi Bank Mandiri

Jakarta, HanTer - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus dugaan korupsi pencairan kredit Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB) tahun 2008-2015 mencapai Rp1,83 triliun. “Hari ini datang Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kami mengantarkan dokumen hasil penghitungan kerugian negara. Ini kelanjutan dari penanganan perkara Bank Mandiri yang telah kami lakukan penyidikan sejak beberapa waktu lalu,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) M Adi Toegarisman di Kejaksaan, Senin (21/5/2018). Sementara itu LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan tidak terbukanya penyidik pada

Pidsus Kejaksaan Agung terkait penyidikan penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi pembobolan kredit PT Bank Mandiri Commercial Banking Center Cabang Bandung kepada PT TAB yang merugikan negara Rp1,5 triliun. Kelima tersangka itu dari bank pelat merah, antara lain, Surya Baruna Semenguk (SBS) selaku Komersial Banking Manager, Frans Eduard Zandra (FEZ) selaku Relationship Manager dan Teguh Kartika Wibowo (TKW) selaku Senior Kredit Risk Manajer. “Saya menyayangkan atas tidak terbukanya penahanan tersebut,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Senin (21/5/2018). Bahkan, MAKI mengultimatum jika dalam sebulan ke depan tidak terbuka atas penahanan itu,

akan mengajukan gugatan praperadilan. Sampai sekarang, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) baru menahan Direktur PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) Rony Tedy dan Juventius sebagai Head Accounting PT TAB. Namun untuk lima tersangka Bank Mandiri, Kejaksaan tidak pernah bersikap terbuka terhadap media telah menahan tiga tersangka itu. Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus, Warih Sadono membantahnya dan menegaskan bahwa penahanan terhadap lima tersangka pembobolan Mandiri itu sudah lama. “Totalnya ada tujuh tersangka, dua dari PT TAB dan lima dari Bank Mandiri,” katanya. ■ **Zamzam**

DPR: Narkoba Ancaman Nyata di Depan Mata

Jakarta, HanTer - Peredaran narkoba semakin meresahkan dan merusak anak muda yang notebene adalah generasi bangsa. Berbagai cara dilakukan para bandar untuk melancarkan bisnis haramnya. Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mencontohkan, temuan aparat penegak hukum lintas sektoral beberapa waktu lalu menunjukkan Indonesia menjadi pasar potensial bagi penyebaran narkoba dengan terungkapnya 1,6 Ton narkoba jenis sabu di Batam, setelah sebelumnya juga dilakukan penangkapan 1 Ton sabu di wilayah perairan Banten. “Wilayah laut China Selatan menjadi salah satu pintu masuknya barang haram tersebut ke wilayah NKRI. mengindikasikan Indonesia menjadi mag-



DANIAL/HANTER

net bagi pelaku penyebaran narkotika jaringan internasional. Narkoba ancaman nyata di depan mata,” papar Sahroni saat Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Jl. Tenggiri depan kantor RW 08 kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Pada kesempatan ini Ahmad Sahroni berpesan kepada warga untuk men-

jauhi narkoba. “Jangan pernah coba-coba pakai narkoba, karena berbahaya bagi kita,” ungkap Sahroni. Sahroni menegaskan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi benteng dalam menanggulangi penyebaran narkoba. Oleh karena itu perlu koordinasi dan pengawasan orang tua dan masyarakat sekitar. ■ **Danial**

Novel Baswedan Dirawat Lagi

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa Novel Baswedan kembali menjalani pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Singapura untuk melihat perkembangan perawatan mata penyidik KPK itu. “Hari ini, dilakukan pemeriksaan kembali di Singapura untuk melihat perkembangan perawatan mata kiri Novel setelah operasi dan kondisi mata kanan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (21/5/2018). Untuk mata kiri, kata Febri, perkembangannya membaik dan juga darah

yang di belakang lensa sudah jauh berkurang atau semakin sedikit. “Penglihatan mata kiri bagian atas yang tadinya tidak terlihat sekarang sudah terlihat. Penglihatan kiri semakin jelas tetapi beberapa permasalahan sebelumnya masih tetap, yaitu lebar pandangan yang sempit dan pandangan berbayang dan penglihatan masih agak gelap dibanding mata kanan,” tuturnya. Terkait persoalan gelap tersebut, kata Febri, dokter menyampaikan bahwa itu terkait masalah syaraf yang lemah dan perlu dilihat perkembangannya ke depan. “Hal yang perlu diperha-

tikan terkait hal itu adalah menjaga tekanan bola mata kiri tidak tinggi karena hal itu bisa memperburuk syaraf mata kiri yang lemah, tentang hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh dokter ahli glukoma,” ungkap Febri. Sedangkan untuk kondisi mata kanan, Febri menginformasikan bahwa pertumbuhan pembuluh darah pada lensa mata kanan akibat luka “carutan” bertambah. “Respons dokter masih sama dengan sebelumnya bahwa “nothing to do” dengan mata kanan selain menjaga kondisi mata kanan tidak menurun. Jika kondisi memburuk, maka akan dilakukan operasi se-

perti halnya mata kiri,” kata dia. Febri pun menyatakan bahwa pada Selasa (22/5/2018) dijadwalkan dilakukan pemeriksaan dengan dokter ahli glaukoma dan juga dokter untuk mengecek kondisi lensa mata. Sementara soal penanganan kasus penyerangan Novel, KPK tetap mengharapkan bisa diselesaikan dengan baik. “Sampai saat ini pelaku belum ditemukan. KPK tetap berharap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK ini bisa diselesaikan dengan baik agar tidak terulang pada pihak lain,” kata Febri. ■ **Safari**



PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Garda Tujuh Buana Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 5 Suite 501A, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Pancoran, Jakarta 12770, Indonesia bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan RUPS akan diilklankan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 sekurang-kurangnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 5 Juni 2018.

Merujuk pada ketentuan POJK 32/POJK.04/2014, setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda RUPST jika memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara Perseroan, usul tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikltnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST yaitu tanggal 30 Mei 2018.

Jakarta, 22 Mei 2018
PT Garda Tujuh Buana Tbk.
Direksi Perseroan

sarasvati
PT. SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dan Public Expose pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan diilklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal 6 Juni 2018.

Jakarta, 22 Mei 2018
PT. SARASWATI GRIYA LESTARI, Tbk.
Direksi

ILUSTRASI

Kepolisian Resor Metro (Polrestro) Bekasi Kota, Jawa Barat, akan menjerat para pelaku minuman keras ilegal di wilayah hukum setempat dengan sanksi terberat guna memberikan efek jera.



ISTIMEWA

“Kalau biasanya sanksi yang menjerat pelaku miras ilegal hanya tindak pidana ringan (tipiring) saja, mulai sekarang kita jerat dengan sanksi terberat

Kombes Pol Indarto

April 2018, Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil mengungkap tindak pidana narkoba sebanyak 13 kasus serta mengamankan 9.000 botol berbagai merek dan 400 miras oplosan. ■ **Danial**



BENTOEI GROUP
PT BENTOEI INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Waktu : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Adonara, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Hendro Martowardjo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Eddy Abdurachman, Komisaris Independen;
3. Bapak Silmy Karim, Komisaris Independen;
4. Bapak Jason Fitzgerald Murphy, Presiden Direktur;
5. Bapak Hardeep Khangura, Direktur;
6. Bapak Martin Arthur Guest, Direktur;

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain atas penunjukannya;
3. Perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 33.662.831.726 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) saham atau merupakan 92,4774204% (sembilan puluh dua koma empat puluh tujuh juta empat dua nol empat persen) dari 36.401.136.250 (tiga puluh enam miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 25 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam RUPST ini telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara RUPST, namun tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham pada saat mata acara RUPST.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPST adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas dengan hak suara yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPST telah diambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Mata Acara Pertama RUPST:

RUPST menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

B. Dalam Mata Acara Kedua RUPST:

RUPST menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK") dan memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

C. Dalam Mata Acara Ketiga RUPST:

RUPST menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan mengubah susunan Direksi Perseroan dengan mengangkat kembali Bapak Jason Fitzgerald Murphy serta Bapak Hardeep Khangura sebagai anggota Direksi Perseroan, dan mengangkat Ibu Mercy Francisca Sinaga dan Bapak Widyo Rulyantoko sebagai anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupan Rapat sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Presiden Komisaris Independen	: Bapak Hendro Martowardjo;
Komisaris Independen	: Bapak Eddy Abdurachman;
Komisaris Independen	: Bapak Silmy Karim.
DIREKSI	
Presiden Direktur	: Bapak Jason Fitzgerald Murphy;
Direktur	: Bapak Hardeep Khangura;
Direktur	: Bapak Martin Arthur Guest;
	(masa jabatan sampai dengan ditutupan RUPST Perseroan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas));
Direktur	: Ibu Mercy Francisca Sinaga;
Direktur	: Bapak Widyo Rulyantoko.

Jakarta, 22 Mei 2018
Direksi Perseroan